

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. “APBD 2015”, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1833>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. “APBD 2016”, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4666>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. “APBD 2017”, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBDDTA2017.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. “APBD 2018”, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBDDTA2018.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2011. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jikwal, Efendi, Agustinus Salle dan Paulus. 2017. “Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah”. *Jurnal Keuangan Daerah*. 2(2): 12.
- Juniawan, Made Ari dan Ni Putu Santi Suryantini. 2018. “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali”. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3): 1255-1281.
- Kartikasari, Mega Ajeng dan Abdul Rohman. 2019. “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal”. Semarang: Universitas Diponegoro. *E-Jurnal Akuntansi Undip*, 8(2): 1.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2016. Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Rizal, Yani dan Erpita. 2019. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa”*. Jurnal Samudra Ekonomika, 3(1) : 1.
- Santoso, Singgih. 2010. *Mastering SPSS 18*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Solihin, Achmad dan Niken Ajeng Lesatri. 2010. *“Ketimpangan fiskal merupakan adanya ketidakseimbangan atau adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal”*. Majalah Ekonomi, 10(1): 1.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. *“Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA pada Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi”*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7(2): 477-495.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2018. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal”*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, 9(2): 1.

- Tolok, Aprianus Doni. 2020. “*Realisasi Belanja Modal Banyak Provinsi Rendah, Jokowi: Hati-Hati!*”, <https://m.bisnis.com/amp/read/20200716/15/1266841/realisasibelanjamodal-banyak-provinsi-rendah-jokowi-hati-hati>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.
- Wati, Masayu Rahma dan Catur Martian Fajar. 2017. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*”. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1): 1.
- Wildan, Muhammad. 2019. “*Alokasi APBD Paling Dominan untuk Belanja Pegawai*”, <https://m.bisnis.com/amp/read/20190719/10/1126443/alokasi-apbd-paling-dominan-untukbelanja-pegawai->, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.